

GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA INDONESIA	20	3-8-2002

Otonomi Mulai Berdampak Buruk pada Lingkungan

■ Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Mengeluh

JAKARTA (Media): Sebagian anggota DPRD kota dan kabupaten mengeluhkan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah mulai berdampak buruk terhadap lingkungan. Pengakuan sebagian anggota DPRD itu muncul saat Forum Dialog antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Ketua DPRD Kabupaten dan Kota dari berbagai daerah di Indonesia, kemarin di Jakarta.

"Demi menggenjot pendapatan asli daerah, pembangunan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan lingkungan. Celakanya, kerusakan lingkungan sering kali dirasakan daerah lain," kata Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Kaltim, Rusman Yaqub

Dia mencontohkan di Kaltim, terdapat tiga daerah yaitu Kutai Barat, Kutai Timur, dan Samarinda yang sama-sama dilalui Sungai Mahakam. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan di Kutai Barat dan Timur yang lokasinya di hulu, ternyata menimbulkan dampak buruk terhadap Kota Samarinda yang terletak di hilir.

"Sungai Mahakam sudah mengalami pendangkalan dan pencemaran akibat penebangan hutan dan industri. Sungai Mahakam pun akhirnya kurang bisa dimanfaatkan. Padahal sungai itu selama ini merupakan sarana jasa dan distribusi serta sumber air minum penduduk kota."

Selain kurang bisa dimanfaatkan, akibat pendangkalan, Pemerintah Kota Samarinda mesti menyediakan dana Rp10-15 miliar untuk mengeruk endapan. "Pembangunan di daerah lain ternyata berakibat buruk terhadap Kota Samarinda dan untuk masalah ini kami tidak bisa berbuat apa-apa," tutur Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda ini.

Penegakan hukum lingkungan sendiri sejauh ini sangat sulit dilakukan. Selain perangkat hukum lingkungan sangat sedikit, komitmen pemda untuk mengusut kasus perusakan lingkungan juga sangat kurang. Rusman mencontohkan untuk masalah *illegal logging* sampai saat ini belum berhasil diselesaikan meski kejadiannya sudah berlangsung sejak lama.

Untuk mengatasi hal ini, dia mengharapkan peran pemerintah pusat untuk menyusun tatanan hukum sehingga pembangunan di satu daerah tidak akan mencemari daerah lain. "Perlu dibangun sistem, agar daerah hati-hati melakukan pembangunan sehingga dampak negatif seperti pencemaran tidak mengganggu daerah lain," tutur Rusman.

Keluhan yang sama juga muncul dari Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Badaruddin Usman. Menurut dia, penambangan timah di luar Pangkal Pinang semakin tidak terkendali demi menggenjot pendapatan asli daerah. Akibatnya, perairan di Selat Bangka sudah tercemar dan rusak berat.

Semakin maraknya penambangan timah berawal dari dikeluarkannya Perda No 20 Tahun 2000. Perda ini mengizinkan rakyat melakukan penambangan timah dengan membayar izin sebesar Rp240 juta.

Pada awal-awalnya, tutur Usman, masyarakat menikmati hasilnya karena harga timah cukup mahal. Apalagi masyarakat bisa langsung mengekspor timah tersebut ke luar negeri dalam bentuk bijih timah.

Namun belakangan, muncul peraturan ekspor ke luar negeri harus dalam bentuk balok timah. Akibat peraturan ini, masyarakat tidak bisa mengekspor bijih timah dan terpaksa menjualnya ke PT Timah dengan harga rendah.

"Persoalan tambah runyam karena harga lada dan karet ikut-ikutan turun sehingga kehidupan ekonomi tambah merosot."

Akibat maraknya penambangan timah ini, kini di Bangka Belitung muncul banyak danau-danau sedalam 20-30 meter yang rawan erosi. Keadaan diperparah dengan maraknya ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura sehingga mulai banyak daerah pinggir pantai mulai tenggelam.

"Pemerintah pusat semestinya ikut campur tangan melakukan rehabilitasi keadaan yang sudah parah tersebut," ujar Ketua DPRD Pangkal Pinang ini.

Mengomentari keluhan anggota DPRD tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Nabeli Makarim menyatakan munculnya otonomi daerah yang membuat daerah gencar melakukan pembangunan banyak memunculkan konflik antardaerah.

Parahnya, lanjut Nabeli, selama ini belum ada mekanisme hukum untuk menggugat pemerintah daerah tertentu yang menimbulkan pencemaran terhadap daerah lain.

"Apalagi institusi pengelolaan lingkungan di berbagai daerah cenderung dipinggirkan karena disatukan dengan dinas pertambangan." (CR-14/V-2)